



2024

# RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

**Kata Pengantar**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat yang baik, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyusun Renja berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan dijadikan dasar untuk penyusunan Renja pada tahun berikutnya. Secara garis besar Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja untuk tahun 2022, serta Rencana Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2024. Renja tersebut memuat sasaran kerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang mengacu Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 2021-2026. Pengacuan tersebut agar selalu terpadu dan konsisten terhadap perencanaan dan penganggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, semoga hasil penyusunan ini dapat dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, 28 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan



**ANI MUFAIDAH**

**DAFTAR ISI**

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> ... ..	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>4</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah .....	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>34</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>48</b>
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	48
4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintahan Kota .....	48
<b>BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
6.1 Catatan Penting.....	52
6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	52
6.3 Rencana Tindak Lanjut.....	53

**BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

## B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

## C. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

- a. Maksud
  - Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;

- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama setahun.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH</b>	<b>7.079.207.500</b>	<b>6.446.784.050</b>	<b>632.423.450</b>	<b>91,10%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.974.214</b>	<b>9.025.786</b>	<b>39,80%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	4.774.214	2.725.786	63,66%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	1.200.000	6.300.000	16,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.591.537.000</b>	<b>5.329.700.321</b>	<b>351.836.679</b>	<b>95,30%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.589.037.000	5.238.110.321	350.926.679	93,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	1.590.000	910.000	63,60%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>777.050.800</b>	<b>613.265.515</b>	<b>163.785.284</b>	<b>78,90%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000	4.997.220	1.780	99,72%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.115.900	44.273.960	5.841.940	88,34%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.990.000	29.475.272	5.514.728	84,24%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.751.200	243.735.190	58.016.010	80,77%
Penyediaan Barang dan Penggandaan	35.101.500	19.873.333	15.228.167	56,62%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.217.000	830.500	7.386.500	10,11%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	12.005.000	22.995.000	34,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.876.200	258.075.040	48.801.159	84,10%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.170.000</b>	<b>178.661.000</b>	<b>20.509.000</b>	<b>89,70%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.170.000	178.661.000	20.509.000	89,70%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.449.700</b>	<b>158.123.828</b>	<b>23.325.872</b>	<b>87,14%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	0	1,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.838.000	20.140.647	6.697.353	75,05%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.111.700	134.483.181	16.628.519	89,00%



<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>315.000.000</b>	<b>251.059.171</b>	<b>63.940.829</b>	<b>79,70%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.000.000	174.163.921	60.836.079	74,11%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	76.895.250	3.104.750	96,12%
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>399.952.800</b>	<b>257.703.208</b>	<b>142.249.592</b>	<b>64,40%</b>
<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>399.952.800</b>	<b>257.703.208</b>	<b>142.249.592</b>	<b>64,40%</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	299.993.800	161.954.238	138.039.562	53,99%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	99.959.000	95.748.970	4.210.030	95,79%
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>999.871.500</b>	<b>876.213.529</b>	<b>123.657.971</b>	<b>87,60%</b>
<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi</b>	<b>949.973.000</b>	<b>834.422.799</b>	<b>115.550.201</b>	<b>87,80%</b>
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	949.973.000	834.422.799	115.550.201	87,75%
<b>Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>49.898.500</b>	<b>41.790.730</b>	<b>8.107.770</b>	<b>83,80%</b>
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.898.500	41.790.730	8.107.770	83,75%
<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>454.969.700</b>	<b>291.993.434</b>	<b>162.976.266</b>	<b>64,20%</b>
<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>264.974.700</b>	<b>194.987.274</b>	<b>69.987.426</b>	<b>73,60%</b>
Pelayanan Antar Kerja	149.974.800	98.487.324	51.487.476	65,67%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	64.999.900	46.995.300	18.004.600	72,30%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0	0	0	0
Perluasan Kesempatan Kerja	50.000.000	49.504.650	495.350	99,01%
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>139.995.000</b>	<b>97.006.160</b>	<b>42.988.840</b>	<b>69,30%</b>
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60.000.000	29.415.000	30.585.000	49,03%
Job Fair/Bursa Kerja	79.995.000	67.591.160	12.403.840	84,49%
<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	0	50.000.000	0%
<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Koordinasi dan Sinronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>514.995.620</b>	<b>361.770.472</b>	<b>153.225.148</b>	<b>70,20%</b>
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>18.421.000</b>	<b>21.579.000</b>	<b>46,10%</b>
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	15.000.000	14.985.000	15.000	99,90%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000	3.436.000	21.564.000	13,74%
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah</b>	<b>474.995.620</b>	<b>343.349.472</b>	<b>131.646.148</b>	<b>72,30%</b>
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.999.560	68.840.606	31.158.954	68,84%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.996.500	63.652.367	36.344.133	63,65%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	99.999.560	74.548.839	25.450.721	74,55%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	136.307.660	38.692.340	77,89%
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>9.448.997.120</b>	<b>8.234.464.692</b>	<b>1.214.532.427,03</b>	<b>87,15%</b>

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, besar anggaran (DPPA) Dinas ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar Rp. 9.448.997.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.234464.602,97 sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.1.214.532.427,03-.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2 e.81**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81,5	7.079.207.500		1.214.591.657	79,32	2.468.882.775		1.124.617.756	79,63	1.638.691.862	79,475	6.446.784.050	98%	91%
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat daerah	63	15.000.000		-		1.286.546	62,32	3.300.000		1.387.668	62,32	5.974.214	99%	40%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3	7.500.000	2	-		1.286.546	1	2.100.000		1.387.668	3	4.774.214	100%	64%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2	7.500.000	1	-		-	1	1.200.000			2	1.200.000	100%	16%

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>83,47</b>	<b>5.591.537.000</b>		<b>1.155.865.610</b>	<b>74,93</b>	<b>2.084.322.419</b>		<b>780.544.710</b>	<b>74,62</b>	<b>1.218.967.582</b>	<b>74,78</b>	<b>5.239.700.321</b>	<b>90%</b>	<b>94%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	26	5.589.037.000	6	1.155.865.610	15	2.084.322.419	2	778.954.710	2	1.218.967.582	25	5.238.110.321	96%	94%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	2.500.000		-	0,15	-	0,76	1.590.000			0,91	1.590.000	91%	64%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81,53</b>	<b>777.050.800</b>		<b>17.802.650</b>	<b>78,95</b>	<b>264.532.504</b>		<b>108.279.433</b>	<b>84,64</b>	<b>222.650.929</b>	<b>81,8</b>	<b>613.265.516</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	4.999.000		-	2,5	-	7,5	4.997.220			10	4.997.220	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	12	50.115.900	6	-	6	12.032.900		12.452.535		19.788.525	12	44.273.960	100%	88%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5	34.990.000	5	-		29.475.272		-			5	29.475.272	100%	84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	78	301.751.200	38	10.835.550	14	133.425.200	8	34.510.910	18	64.963.530	78	243.735.190	100%	81%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	20	35.101.500		-	9	11.849.420	7	1.542.179	4	6.481.734	20	19.873.333	100%	57%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	8.217.000		-		-		-	3	830.500	3	830.500	100%	10%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	200	35.000.000		-	10	-	40	-	150	12.005.000	200	12.005.000	100%	34%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	225	306.876.200	11	6.967.100	113	77.749.712	55	54.776.589	46	118.581.639,97	225	258.075.040,97	100%	84%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79,12</b>	<b>199.170.000</b>		<b>-</b>	<b>80,5</b>	<b>5.390.000</b>		<b>159.396.000</b>	<b>84,64</b>	<b>13.875.000</b>	<b>82,6</b>	<b>178.661.000</b>	<b>104%</b>	<b>90%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	7	199.170.000	1	-	1	5.390.000	4	159.396.000	1	13.875.000	7	178.661.000	100%	90%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82,75</b>	<b>181.449.700</b>		<b>23.947.047</b>	<b>78,54</b>	<b>58.479.876</b>		<b>23.161.552</b>	<b>84,64</b>	<b>52.535.353</b>	<b>81,6</b>	<b>158.123.828</b>	<b>99%</b>	<b>87%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	1	3.500.000	0,5	1.750.000	0,5	1.750.000		-			1	3.500.000	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6	26.838.000	1,5	4.951.647	1,2	6.670.000	0,7	1.700.800	2,6	6.818.200	6	20.140.647	100%	75%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	7	151.111.700	7	17.245.400	7	50.059.876	7	21.460.752	7	45.717.153	7	134.483.181	100%	89%

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78,8</b>	<b>315.000.000</b>		<b>16.976.350</b>	<b>80,6</b>	<b>54.871.430</b>		<b>49.936.061</b>	<b>84,64</b>	<b>129.275.330</b>	<b>82,6</b>	<b>251.059.171</b>	<b>105%</b>	<b>80%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	15	235.000.000	6	16.976.350	1	32.493.830	5	49.936.061	3	74.757.680	15	174.163.921	100%	74%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	2	80.000.000	0,36	-	0,56	22.377.600	0,5	-	0,58	54.517.650	2	76.895.250	100%	96%
<b>Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur</b>	<b>54</b>	<b>999.871.500</b>	<b>5</b>	<b>5.369.662</b>	<b>-</b>	<b>29.159.863</b>	<b>20</b>	<b>205.600.000</b>	<b>36</b>	<b>636.084.004</b>	<b>61</b>	<b>876.213.529</b>	<b>113%</b>	<b>88%</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan</b>	<b>100</b>	<b>949.973.000</b>	<b>14,6</b>	<b>5.369.662</b>		<b>29.159.863</b>	<b>63</b>	<b>205.600.000</b>	<b>22,40</b>	<b>594.293.274</b>	<b>100</b>	<b>834.422.799</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	95	949.973.000	12	5.369.662		29.159.863	60	205.600.000	20	594.293.274	92	834.422.799	97%	88%



Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	10	49.898.500		-		-	2,3	-		41.790.730	2,3	41.790.730	23%	84%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPK Swasta yang dibina	30	49.898.500		-	4		25	-	1	41.790.730	30	41.790.730	100%	84%
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	-		-		-		-	20	-	20	-	100%	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	1	-		-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3,2	399.952.800		19.200.780		40.538.250		95.054.808	2,92	102.909.370	2,92	257.703.208	91%	64%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	2	399.952.800		19.200.780	1	40.538.250		95.054.808	1	102.909.370	2	257.703.208	100%	64%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	1	299.993.800	0,2	19.200.780	0,24	40.538.250	0,5	95.054.808	0,06	7.160.400	1	161.954.238	100%	54%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	40	99.959.000			7	-	26	-	7	95.748.970	40	95.748.970	100%	96%

<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23	454.969.700	8,67	-	3,72	60.572.650	5,4	83.436.260	7,21	147.984.434	25	291.993.344	109%	64%
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23	264.974.700	8,67	-	3,72	60.572.650	5,4	15.845.100	7,21	118.569.434	25	194.987.184	109%	74%
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	4300	149.974.800	1075	-	1075	4.018.000	1197	8.295.600	875	86.173.634	4222	98.487.234	98%	66%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	6	64.999.900		-	1,5	7.050.000	2,7	7.549.500	0,35	32.395.800	4,55	46.995.300	76%	72%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1	-		-		-		-			0	-		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	25	50.000.000		-	25	49.504.650		-			25	49.504.650	100%	99%
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker</b>	<b>5</b>	<b>139.995.000</b>		-	<b>1</b>	-		<b>67.591.160</b>	<b>5,4</b>	<b>29.415.000</b>	<b>6,4</b>	<b>97.006.160</b>	<b>128%</b>	<b>69%</b>
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	jumlah aplikasi yang dipelihara	3	60.000.000		-	0	-	2,1	-	0,9	29.415.000	3	29.415.000	100%	49%
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan	1	79.995.000		-	0	-	0,9	67.591.160			0,9	67.591.160	90%	84%

Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan Perpanjangan IMTA / Notifikasi yang diproses	100	-		-	0	-		-		-	0	-		
Koordinasi dan Sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/Kota	Persentase Jumlah TKA yang mengurus perpanjangan Notifikasi	100	-		-	0	-		-		-	0	-		
<b>PERLINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Permohonan Perpanjangan IMTA / Notifikasi yang diproses</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Persentase Jumlah TKA yang mengurus perpanjangan Notifikasi	100	50.000.000		-	0	-		-	100	-	100	-	100%	
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	<b>69</b>	<b>514.995.620</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>60.404.106</b>	<b>28</b>	<b>63.339.100</b>	<b>24,5</b>	<b>238.027.266</b>	<b>87,5</b>	<b>361.770.472</b>	<b>127%</b>	<b>70%</b>
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80	40.000.000		-	20	-		14.985.000	62	3.436.000	82	18.421.000	103%	46%

Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	40	-	0	-	0	-	0	-	55		55	-	138%	
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	100	15.000.000	88	-	12	-		14.985.000			100	14.985.000	100%	100%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	20	25.000.000		-	5	-		-		3.436.000	5	3.436.000	25%	14%
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	<b>80</b>	<b>474.995.620</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>60.404.106</b>		<b>48.354.100</b>	<b>47,5</b>	<b>234.591.266</b>	<b>87,5</b>	<b>343.349.472</b>	<b>109%</b>	<b>72%</b>
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2	99.999.560	1	-	0,6	26.218.181	0,25	-		42.622.425	1,85	68.840.606	93%	69%

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	50	99.996.500	12	-		3.085.925	3	1.864.300	35	58.702.142	50	63.652.367	100%	64%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	3	99.999.560		-	2	31.100.000	0,82	36.949.800	0,15	6.499.039	2,97	74.548.839	99%	75%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	4	175.000.000		-	0,85	-	0,15	9.540.000	3	126.767.660	4	136.307.660	100%	78%
	Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	6													
	Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini	4										0	-		
			<b>9.448.997.120</b>		<b>1.239.162.099</b>		<b>2.659.557.644</b>		<b>1.572.047.924</b>		<b>2.763.696.935,97</b>		<b>0 8.234.464.602,97</b>		

## 2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63.8	64.29	101%
		2. Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.2	2.92	91%
		3. persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	54	61	113%
		4. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23	25	110%
		5. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	69	87.5	127%
2.	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	63	62.32	99%
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	32.91	33.59	102%
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	86.51	102%
<b>Rata - Rata Capaian</b>						<b>104%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hampir seluruh sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan mencapai nilai di atas target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 104%. berdasarkan hasil evaluasi capaian terdiri atas 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** yang terdiri atas 5 indikator kinerja, masing-masing adalah:
  - **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** Memperoleh capaian kinerja sebesar 101% dengan realisasi sebesar 64.29% dari target 63.8%.
  - **Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)** yang tersusun sebesar 2.92 % dari target 3.2 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 91%.
  - **Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur** , kegiatan tersebut mencapai realisasi sebesar 61 % dari target 54 %. Sehingga besar capaian kinerjanya sebesar 113%
  - **Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan** terealisasi sebesar 25 % dari target 23 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 110%.
  - **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama** terealisasi sebesar 87.5 % dari target 69 %. Sehingga capaian Kinerjanya sebesar 127%
  
2. **Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel** terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah :
  - **Nilai SAKIP OPD** dengan capaian kinerja sebanyak 99%, Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 86.51 % dari target sebesar 63 %.
  - Realisasi **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** sebesar 33.59 % dari target sebesar 32.91 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%.
  - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah** teralisasi sebesar 86.51 % dari target sebesar 85 %. Sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 102%

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementerian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2024 adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan yang masih diatas rata – rata regional dan nasional;
2. Penyerapan tenaga kerja terdidik yang masih rendah, kompetensi/ ketrampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan pasar kerja yang membutuhkannya;
3. Produktivitas tenaga kerja Kota Balikpapan yang masih rendah;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas;
5. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan peningkatan kepersertaan jaminan social tenaga kerja;
7. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan transmigrasi.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2024 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencaker, pelaporan pencaker/lowongan kerja, dll.;
- b. Pembuatan AK-I Online dan Bursa Kerja Online;
- c. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
- d. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
- e. Pelayanan pembinaan / motivasi bagi pencaker fresh graduate melalui kegiatan Wednesday Inspiring setiap bulannya pada minggu ke-1 dan minggu ke-3; dan
- f. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencaker korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja;
- g. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- h. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK



- i. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
- j. Pemasyarakatan Hubungan Industrial
- k. Melaksanakan Seleksi Pelatihan Online
- l. Berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di Kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih
- m. Berupaya membangun kerjasama dengan BLK Milik Pemerintah

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Balikpapan**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(2)		(3)	(5)	(6)	(2)		(3)	(5)	(6)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>83.5%</b>	<b>8.474.636.807</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>83.5%</b>	<b>8.474.636.807</b>
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>65</b>	<b>17.996.314</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Disnaker (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan)	3 Dok	8.998.157	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Disnaker (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan)	3 Dok	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Laporan	8.998.157	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Laporan	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>83.77%</b>	<b>6.261.217.597</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>83.77%</b>	<b>6,559,511,317</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/bln	6.258.218.211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/bln	6,559,511,317
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.999.386	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>82.15%</b>	<b>368.549.461</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>82.15%</b>	<b>368.549.461</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	40.225.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	40,225,500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Disnaker	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	31 orang	328.323.961	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Disnaker	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	31 orang	328,323,961

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81.93%</b>	<b>948.142.618</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Disnaker	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81.93%</b>	<b>1,091,387,415</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.771	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.771
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.993.857	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26,091,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.991.399	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	33,282,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	362.029.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	456,435,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	20 Paket	42.112.651	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	20 Paket	54,846,250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.857.546	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	8,574,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	456.158.894	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	456,158,894
Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	5 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	5 Dokumen	50,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>79.62%</b>	<b>256.658.228</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>79.62%</b>	<b>351,500,000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	190,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	256.658.228	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	161,500,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.15%</b>	<b>256.147.536</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.15%</b>	<b>284,679,837</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.199.140	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,199,140

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Laporan	41.991.399	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Laporan	44,432,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		--	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Laporan	26,091,700
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Yang Disediakan	13 Laporan	209.956.997		Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Yang Disediakan	13 Laporan	209,956,997
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.30%</b>	<b>365.925.053</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disnaker</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.30%</b>	<b>365,925,053</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	269.944.711-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	269,944,711
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	95.980.342	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharA	16 Unit	95,980,342

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>0.033</b>	<b>135.440.100</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>0.033</b>	<b>135.440.100</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	135.440.100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	135.440.100
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	43 Orang	135.440.100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	43 Orang	135.440.100
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalu</b>	<b>55%</b>	<b>1.257.334.200</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalu</b>	<b>55%</b>	<b>1,347,570,600</b>
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100 %	1.137.807.000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100 %	1,287,807,000
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	111 Orang	1.137.807.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	111 Orang	1,287,807,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	15 %	59.763.600	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	15 %	0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPK	59.763.600	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPK	0
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	1 kali	59.763.600	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivita pada perusahaan kecil	1 kali	59,763,600
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 Perusahan	59.763.600	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 Perusahan	59,763,600
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>23.5%</b>	<b>572.219.539</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Disnaker	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>23.5%</b>	<b>462,455,939</b>
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	359.253.941	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	249,490,341
Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.500 Pencaker	179.963.141	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.500 Pencaker	154,963,141
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	480 Orang	59.763.600	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	480 Orang	47,263,600



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 Orang	59.763.600	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 Orang	47,263,600
Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	18 Orang	59.763.600	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	18 Orang	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada system loker Disnaker	5%	167.965.598	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada system loker Disnaker	5%	167,965,598
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	71.985.256	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	71.985.256
Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	95.980.342	Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	95.980.342

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani	100%	45.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani	100%	45.000.000
Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	45.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	45.000.000
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	<b>69%</b>	<b>617.873.449</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	<b>69%</b>	<b>469.883.278</b>
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	47.990.171	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	0
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	45 Perusahaan	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	45 Perusahaan	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Bersama	1 Perusahaan	17.996.314	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Bersama	1 Perusahaan	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	29.993.857	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	0
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	<b>80%</b>	<b>569.883.278</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Disnaker</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	<b>80%</b>	<b>469.883.278</b>
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	119.975.427	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	119.975.427

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	119.975.427	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	94.975.427
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	119.975.427	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	94.975.427
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	209.956.997	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	159.956.997
				<b>11.057.504.095</b>					<b>11,436,903,000</b>

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

<b>No.</b>	<b>Kebijakan Nasional / Provinsi</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional	Nomor 12 Tahun 2020	
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		
3	Percepatan sertifikasi profesi		
4	Perluasan kesempatan kerja formal		
5	Penguatan wirausaha produktif		
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif	Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan		
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra Disnakertrans Prov. Kaltim Periode 2019-2023	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Rasio Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63.8	64.29	101%
			2. Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.2	2.92	91%
			3. persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	54	61	113%
			4. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23	25	110%
			5. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	69	87.5	127%
2.	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel		1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	63	62.32	99%
			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	32.91	33.59	102%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	86.51	102%
<b>Rata - Rata Capaian</b>							<b>104%</b>

Berdasar hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat, sedangkan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
- 2) Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2024, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
  - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
    - ✓ Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
    - ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
  - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
    - ✓ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan diantaranya:
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
    - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
  - Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
    - ✓ Pelayanan Antar Kerja, Penyuluhan
    - ✓ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
    - ✓ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
    - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
  - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - ✓ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
    - ✓ Job Fair / Bursa Kerja
  - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
    - ✓ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

- d. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
    - ✓ Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
    - ✓ Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
    - ✓ Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan.
  - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
    - ✓ Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,
    - ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
    - ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi
    - ✓ Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belaja rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel T.C-33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>85,5%</b>	<b>8,642,154,178</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>85,5%</b>	<b>9.372.907.311</b>
2 07 1 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>68</b>	<b>19.891.326</b>
2 07 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Kota Balikpapan	3 Dok	0	APBD Kota	Penting	3 Dok	9.945.663
2 07 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 Dok	0	APBD Kota	Penting	2 Dok	9.945.663
2 07 1 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>83.77%</b>	<b>6,559,511,317</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>84,07%</b>	<b>6.920.523.809</b>
2 07 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	30 Org/bln	6,559,511,317	APBD Kota	Penting	26 Dok	6.917.208.588
2 07 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Laporan	0	APBD Kota	Penting	1 Dok	3.315.221

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>82.15%</b>	<b>368,549,461</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>82,55%</b>	<b>406.897.362</b>	
2	07	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	31 Paket	40,225,500	APBD Kota	Penting	32 orang, 2 jenis	44.461.245
2	07	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	31 orang	328,323,961	APBD Kota	Penting	32 orang	362.436.117
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>81.93%</b>	<b>1,091,387,415</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>81,93%</b>	<b>1.054.333.641</b>	
2	07	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	1 Paket	5,998,771	APBD Kota	Penting	12 jenis	6.630.442
2	07	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	2 Paket	26,091,700	APBD Kota	Penting	19 Jenis Dan 13Jenis	33.152.210
2	07	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	5 Paket	33,282,000	APBD Kota	Penting	8 jenis	46.413.094
2	07	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	3 Paket	456,435,800	APBD Kota	Penting	80 jenis	400.151.206
2	07	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	20 Paket	54,846,250	APBD Kota	Penting	20 jenis	46.547.113

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	07	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Balikpapan	4 Dokumen	8,574,000	APBD Kota	Penting	4 jenis	10.895.546
2	07	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	226 Laporan	456,158,894	APBD Kota	Penting	275 kali	510.544.031
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	5 Dokumen	50,000,000	APBD Kota	Penting	5 Dokumen	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>79.62%</b>	<b>351,500,000</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>80,12%</b>	<b>283.684.340</b>
					Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	2 Unit	190,000,000				
2	07	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	16 Unit	161,500,000	APBD Kota	Penting	17 Jenis	283.684.340
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>83.15%</b>	<b>284,679,837</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>83,55%</b>	<b>283.119.872</b>
2	07	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4,199,140	APBD Kota	Penting	1 jenis	4.641.309
2	07	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	6 Laporan	44,432,000	APBD Kota	Penting	6 jenis	46.413.094
2	07	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan		26,091,700	APBD Kota	Penting	8 paket	-
2	07	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	13 Laporan	209,956,997	APBD Kota	Penting	7 orang	232.065.469

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	07	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>79.30%</b>	<b>365,925,053</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>79,80%</b>	<b>404.456.960</b>
2	07	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan	12 unit	269,944,711	APBD Kota	Penting	14 unit	298.369.889
2	7	1	2.09	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16 Unit	95,980,342			10 paket	106.087.072
2	.07	.02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>3.3 %</b>	<b>135,440,100</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>3,4%</b>	<b>143.088.836</b>
2	.07	.02	.2.01	.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>1 Dok</b>	<b>135,440,100</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>1 Dok</b>	<b>143.088.836</b>
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro		43 Orang	135,440,100			48 Orang	143.088.836
2	.07	.03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>55%</b>	<b>1,347,570,600</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>56%</b>	<b>1.389.731.491</b>
2	.07	.03	.2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>100 %</b>	<b>1,287,807,000</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>100%</b>	<b>1.257.618.077</b>
2	.07	.03	.2.01	.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	111 Orang	1,287,807,000	APBD Kota	Penting	120 Org	1.257.618.077

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .03 .2.02 .01	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi</b>	Kota Balikpapan	15 %	0	APBD Kota	Penting	15%	<b>66.056.707</b>
2 .07 .03 .2.02 .01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	0	APBD Kota	Penting	30 LPK	66.056.707
2 .07 .03 .2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Kota Balikpapan	1 kali	59,763,600	APBD Kota	Penting	1 Dok	<b>66.056.707</b>
2 .07 .03 .2.04 .01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	20 Perusahaan	59,763,600	APBD Kota	Penting	25 Perusahaan	66.056.707
2 .07 .04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>23,6%</b>	<b>462,455,939</b>	<b>APBD Kota</b>	<b>Penting</b>	<b>23,6%</b>	<b>632.735.756</b>
2 .07 .04 .2.01	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</b>	Kota Balikpapan	23,6%	249,490,341	APBD Kota	Penting	23,6%	<b>397.083.380</b>
2 .07 .04 .2.01 .02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	4.500 Pencaker	154,963,141	APBD Kota	Penting	4.500 Pencaker	198.913.259
2 .07 .04 .2.01 .03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	47,263,600	APBD Kota	Penting	480 Orang	66.056.707
2 .07 .04 .2.01 .04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	1 Orang	47,263,600	APBD Kota	Penting	1 Orang	66.056.707
2 .07 .04 .2.01 .05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	Kota Balikpapan	18 Orang	0	APBD Kota	Penting	22 Orang	66.056.707

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .04 .2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan perusahaan yang bergabung pada sistem loker Disnaker</b>	Kota Balikpapan	5%	<b>167,965,598</b>	APBD Kota	Penting	<b>5%</b>	<b>185.652.375</b>
3 .07 .04 .2.03 .01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Dokumen	71,985,256	APBD Kota	Penting	1 Dokumen	79.565.304
2 .07 .04 .2.03 .03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Balikpapan	2 Kali 500 Orang	95,980,342	APBD Kota	Penting	2 Kali 500 Orang	106.087.072
2 .07 .04 .2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani</b>	Kota Balikpapan	<b>100%</b>	<b>45,000,000</b>	APBD Kota	Penting	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
2 .07 .04 .2.04 .02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	5 Orang	45,000,000	APBD Kota	Penting	5 Orang	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kota Balikpapan	69%	469,883,278	APBD Kota	Penting	69%	682.935.523
2 .07 .05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	Kota Balikpapan	80%	0	APBD Kota	Penting	80%	53.043.536
2 .07 .05 2.01 .01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	Kota Balikpapan	45 Perusahaan	0	45 Dokumen	Penting	45 Dokumen	-
2 .07 .05 02:03 .02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Balikpapan	1 Perusahaan	0	100 Dokumen	Penting	100 Dokumen	19.891.326
2 .07 .05 02:03 .03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Balikpapan	25 Laporan	0	25 Dokumen	Penting	25 Laporan	33.152.210



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	.07 .05 02:02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	80%	469,883,278	APBD Kota	Penting	80%	629.891.987
2	.07 .05 02:02 .01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	200 Perkara	119,975,427	APBD Kota	Penting	200 Perkara	132.608.839
2	.07 .05 02:02 .02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Perkara	94,975,427	APBD Kota	Penting	40 Perkara	132.608.839

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Program/Kegiatan	Daerah	Urusan dan	Indikator Program/Kegiatan	Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	.07	.05	02:02	.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kota Balikpapan	1 Asosiasi 24 Serikat Pekerja	94,975,427	APBD Kota	Penting	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	132.608.839
2	.07	.05	02:02	.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	159,956,997	APBD Kota	Penting	1 Lembaga	232.065.469
									11,436,903,000				12.221.398.917

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

**4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

**4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota**

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai OPD yang bersinggung/berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha/perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mendukung prioritas Pemerintah Kota dengan Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kota.

**BAB V****INOVASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Sementara itu, Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka turut serta melaksanakan pelayanan publik berkualitas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan beberapa Inovasi. Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**1. Layanan AK-I Online**

Kartu Tanda Pencari Kerja yang sering disebut sebagai kartu AK1. Layanan Pembuatan AK-I Online adalah layanan membuat Kartu pencari kerja dimana Pencari kerja yang berdomisili Kota Balikpapan dapat melakukan pendaftaran secara online dan mencetak kartu AK 1 secara mandiri (tanpa harus datang ke kantor). Kartu ini berisi beberapa informasi mengenai pemiliknya seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, dan data kelulusan pendidikan. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Proses pembuatan AK-I dapat lebih cepat dan Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses pembuatan Kartu AK-I.

## **2. Layanan Buka Line (Bursa Kerja Online)**

Sistem Informasi Bursa Kerja Online Berbasis Web adalah sistem yang mampu menampilkan informasi lowongan sesuai dengan masukan dari pelamar kerja untuk memperoleh informasi lowongan yang tersedia dalam bursa kerja. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses lowongan kerja dan Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja.

## **3. Layanan Halo HI**

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo HI, layanan tersebut merupakan Layanan Konsultasi Bidang Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo HI memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

- a) Tenaga kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait permasalahan Hubungan Industrial
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi Tenaga Kerja dengan perusahaan terkait permasalahan Hubungan Industrial

## **4. Layanan Halo Penta**

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Penta. Layanan Halo Penta merupakan Layanan Konsultasi Bidang PPK yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo Penta memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

- a) Para pencari kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait informasi Ketenagakerjaan
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja

## 5. Layanan Halo Lattas

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Lattas. Layanan Halo Lattas merupakan Layanan Konsultasi Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Adapun dampak positif dari Layanan Lattas adalah sebagai berikut :

- a) Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Catatan Penting**

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (misalnya tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

#### **6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Sub Koordinator, Subbag, dan seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

### 6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 28 Februari 2023

**Dinas Ketenagakerjaan**

**Kota Balikpapan**



**ANI MUFAIDAH**



### 6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 28 Februari 2023

**Dinas Ketenagakerjaan**

**Kota Balikpapan**

**ANI MUFAIDAH**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Agung Budi Wibowo	Sekretaris Dinas	
2	Andi Idris Amran	Kasubbag Program Keuangan	

